BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat penting bagi warga negara. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.Oleh karena itu setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1954 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan.

Layanan pendidikan terhadap seluruh rakyat merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak sarta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang bermutu, maka ditetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Meteri Pendidikan nasional Nomor 129a/U/2004.Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan merupakan ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah. Penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan, maka setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan Sarana dan Prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di desa-desa, menunjukan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Program pendidikan yang ada di provinsi, selama ini sudah berjalan dengan baik dari tahun ke tahun. Namun, Pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Seperti ruang kelas baru, maupun meja dan kursi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. “Bila

melihat penganggaran, tentu masih sangat minim. Tapi kita semua harus berupaya agar yang telah diprogramkan bisa terlaksana. Apalagi pendidikan menjadi salah satu prioritas, dalam upaya meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) (Syarwani, 2019).

Dari kondisi real tersebut, maka penliti temukan bahwa dalam penerapan SPM sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor dapat diketahui bahwa masih ada beberapa sarana dan prasarana yang belum bisa dikatakan memenuhi standar. Dari hasil observasi bahwa lapangan atau halaman sekolah tidak memadai digunakan untuk kegiatan olahraga dan kegiatan upacara bendara merah putih. Lapangan digenangi air dn berlumpur sehungg tidak dapat difungsikan untuk kegiatan ekstrakulikuler. Laboratorium dan lap computer juga belum mamadai sehingga menjadi kendala bagi siswa SMA Agape Tanjung selor untuk peningkatkan kompetensi dibidang teknologi dan di bidang praktikum IPA. Keberadaan sarana dan prasarana yang tidak memadai maka berpotensi dapat mengurangi mutu layanan kepada siswa dan dapat berdampak negatif terhadap kualitas lulusan sekolah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji kesenjangan dalam mengimplementasi Standar Pelayanan Minimum Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor, sehingga dihasilkannya rekomendasi yang dapat digunakan dalam pencapaian target standar pelayanan minimum.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana implementasi standar pelayanan minimum sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi SPM Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yaitu

1. Untuk mengetahui implementasi standar pelayanan minimum sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi SPM Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka dapat diuraikan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberi solusi dari berbagai masalah yang dihadapi terutama dalam mengembangkan kebijakkan mengenai pendidikan menengah atas.
2. Memberikan masukan penting untuk memperluas pandangan dalam perencanaan kebijakan sehingga dapat disusun rancangan kegiatan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi di sektor pendidikan.
3. Memberikan masukan yang berguna bagi penyusunan strategi perkembangan pendidikan menengah yang lebih tepat bagi program pengembangan pendidikan pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman (2002: 70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Guntur Setiawan Guntur Setiawan 2004:39 berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikanproses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukanjaringan pelaksana,birokrasi yang efektif.

Menurut Syaukani dkk (2004:295) implementasi merupakan suaturangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakatsehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup,*Pertama*persiapan seperangkat peraturanlanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.*Kedua*,menyiapkansumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnyasarana dan prasarana, sumber daya

keuangan dan tentu sajapenetapan siapa yangbertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut.*Ketiga*,bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Syukur dalam Surmayadi (2005: 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

a. Adanya program atau kebijakan yangdilaksanakan,
b. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan,
c. Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2. Konsep Pelayanan

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pengertian pelayanan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal, cara, atau hal kerja melayani, sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman, menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima, menggunakan. Pelayanan menurut Moenir (2002:6) adalah kegiatan yang diteruskan oleh organisasi atau perseorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki, konsumen yaitu masyarakat yang

mendapat manfaat dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi yang memberikan pelayanan.

Konsep pelayanan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada seseorang dalam bentuk jasa. Menurut Moenir (2002:17), pada dasarnya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan orang lain. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung ini yang disebut sebagai pelayanan. Jadi pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sehingga pelayanan senantiasa dengan kepentingan publik atau umum. Masih menurut Moenir, bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan yang menyangkut masyarakat, tidak bertentangan dengan norma-norma dan aturan yang bersumber dari kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan pelayanan umum diharapkan pada terselenggaranya pelayanan untuk memenuhi kepentingan umum atau kepentingan perorangan, malalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. Agar pelayanan umum berhasil baik unsur pelaku sangat menentukan, pelaku dapat berbentuk badan atau organisasi yang bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan.

Secara umumbentuk pelayanan yang tidak selamanya berdirisendiri secara murni melainkansering komunikasi, antara lain:

a. Pelayanan dengan lisan

   Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat, bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain

yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan.

b. Pelayanan melalui tulisan

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi pelayanannya.

c. Pelayanan dalam bentuk perbuatan

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah, karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan.

d. Pelayanan Materi

Produk harus dapat diandalkan dan melakukan apa yang dispesifikasikan untuk dilakukan.

e. Pelayanan Pribadi

Penyatuan dan ahli karyawan sangat penting bagi kemampuan perusahaan dalam memenuhi harapan staf yang mempunyai hubungan langsung dengan pelanggan. Sehubungan dengan peran pelayanan yang sangat penting dalam mempengaruhi konsumen dalam *serviceexcellence* yaitu pelayanan yang unggul. Yakni suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan.(Moenir,2000:190).

3. Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan

Menurut KBBI (2007:999) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Mulyasa (2004:49) memaparkan bahwa yang disebut dengan sarana belajar merupakan segala peralatan yang secara langsung digunakan oleh guru atau siswa dalam proses belajar mengajar contohnya seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta media pembelajaran. Selain itu, menurut Tholib (2000:97) sarana pendidikan adalah peralatan yang secara langsung yang dapat mencapai tujuan pendidikan, misalnya: ruang, buku, perpustakaan, labolatorium, dan sebagainya.

Sedangkan Menurut KBBI (2007:999) prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Berbeda dengan pendapat Daryanto (2008:51) secara bahasa yang disebut dengan prasarana berarti alat yang tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya: lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya. Adapun prasarana belajar menurut Makin & Baharuddin (2010:84) adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran, seperti halaman, kebun, tamansekolah, jalan menuju sekolah dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa sarana belajar bertujuan untuk mempermudah penyampaian materi ajar, dalam artian segala macam peralatan yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyampaian

dan menerima materi pembelajaran. Sedangkan prasarana belajar untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan dalam artian segala macam peralatan, perlengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan.

4. Standardisasi Sarana dan Prasarana

Kata *standardisasi* (Handoko, 2011) bukan berasal dari kata *standard+ isasi*, tetapi merupakan sebuah kata dasar hasil serapan dari bahasa asing. Kata *standardisasi* mempunyai arti penyesuaian bentuk (ukuran atau kualitas) dengan pedoman atau standar yang telah ditetapkan. (Barnawi & Arifin, 2012: 86). *Standardisasi* sarana dan prasarana sekolah dapat diartikan sebagai sauatu penyesuaian bentuk, baik spesifikasi, kualitas, maupun kuantitas sarana dan prasarana sekolah dengan kriteria minimum yang telah ditetapkan untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas publik serta meningkatkan kinerja penyelenggara sekolah.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar sarana dan prasarana pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar,

tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagaimana dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. (Mulyasa, 2006: 20)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) sekurang-kurangnya memiliki 11 jenis prasarana sekolah, yang meliputi (1) ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3) ruang laboratorium IPA, (4) ruang pimpinan, (5) ruang guru, (6) ruang beribadah, (7) ruang UKS, (8) jamban/WC, (9) gudang, (10) ruang sirkulasi, (11) tempat bermain/olahraga.

a. Ruang Kelas

1) Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
2) Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.

3) Kapasitas maksimum ruang kelas 28 peserta didik.
4) Rasio minimun luas ruang kelas 2 m^2/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m^2. Lebar minimum ruang kelas 5 m.
5) Ruang kelas memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
6) Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan. (Permendiknas No. 24 Tahun 2007)

b. Ruang Perpustakaan

1) Ruang perpustakaan adalah tempat dimana buku-buku disimpan dan dibaca. Disana guru dan peserta didik dapat memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan cara membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.
2) Luas ruang perpustakaan sama dengan luas satu kelas dan lebar minimum ruang perpustakaan 5 m.
3) Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
4) Ruang perpustakaan terletak dibagian sekolah yang mudah dicapai.

c. Ruang Laboratorium IPA

1) Laboratorium SD/MI dapat memanfaatkan ruang kelas.

2) Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan.

d. Ruang Pimpinan

1) Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas Dinas Pendidikan, dan tamu lainnya.
2) Luas minimum ruang pemimpin 12 m^2 dan lebar minimum 3m.
3) Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah, dapat dikunci dengan baik.

e. Ruang Guru

1) Ruang guru memiliki fungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.
2) Rasio minimum luas ruang guru 4 m^2/pendidik dan luas minimum 32 m^2
3) Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.

f. Tempat Ibadah

1) Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
2) Banyaknya tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap satuan pendidikan dengan luas minimum 12 m^2 .

g. Ruang UKS

1) Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah.
2) Ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling.
3) Luas minimun ruang UKS 12 m^2.

h. Jamban

1) Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan kecil.
2) Minimun 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita dan 1 unti untuk guru. Banyak minimun jamban setiap sekolah 3 unit.
3) Luas minimum 1 unit jamban 2 m^2.
4) Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
5) Tersedia air bersih di setiap unit jamban

i. Gudang

1) Gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat penyimpanan sementara peralatan sekolah/madrasah yang tidak/belum berfungsi dan tempat penyimpanan asrip sekolah/madrasah yang telah berusia dari 5 tahun.
2) Luas minimum gudang 18 m^2
3) Gudang dapat dikunci.

j. Ruang Sirkulasi

1) Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah/madrasah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik diluar jam pelajaran. terutama pada saat hujan, ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegitan tersebut berlangsung di halaman sekolah/madrasah.
2) Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruangan-ruangan di dalam bangunan sekolah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruangan pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi 2,5 m.
3) Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap serta mendapat pencahayaan dan pengawasan yang cukup.

k. Tempat Bermain/Olahraga

1) Tempat bermain atau berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakulikuler.
2) Rasio minimum luas tempat bermain/berolahraga 3 m^2/peserta didik. Untuk satuan pendidikan dengan banyak peserta kurang dari 167, luas minimum tempat bermain/berolahraga 500 m^2. Di dalam luasan tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga berukuran 20 m x 15 m.
3) Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami pohon penghijauan.

4) Tempat bermain/berolahraga diletakan ditempat yang tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas.
5) Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.
6) Ruang bebas yang dimaksud di atas merupakan memliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak mengganggu pohon, saluran air serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga.

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 bahwa sarana dan prasarana yang harus ada dijenjang SMA/MA terdiri dari 11 Sarana dengan jenis, rasio dan deskripsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekolahnya.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberpa peelitian tedahulu yang peneliti jadikan sebagai referensi demi kesempurnaan penelitian:

a. Teguh Prasetya, Muslih Faozanudin, Dyah Retna Puspita. 2018. Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Spm-Dikdas) Tingkat Smp (Studi Pada Smp N 6 Satu Atap Rembang Dan Smp N 3 Purbalingga). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses implementasi SPM Dikdas di SMP N 6 Satu Atap Rembang belum berjalan baik karena masih kekurangan tenaga pada Bagian Tata Usaha di SMP N 6 satu Atap Rembang sedangkan sedangkan pada SMP N 3 Purbalingga sudah berjalan cukup baik dijalankan oleh para aktor. Tujuan Program Implementasi SPM Dikdas Sudah Cukup Jelas, namun adakalanya tujuan tidak tercapai secara maksimal karena rencana kegiatan yang dibuat masih terkesan kurang

berani karena terhambat oleh ketatnya aturan dan ketersediaan sumber dana. Perkembangan program SPM Dikdas Tingkat SMP sudah cukup baik, namun masih kurang cepat karena terhalang oleh sumber daya manusia yang masih belum memenuhi kriteria indikator SPM Dikdas. Pihak-pihak lain sudah berpartisipasi cukup baik namun demikian perlu koordinasi yang lebih baik antar pihak-pihak tersebut sehingga terjadi hubungan komunikasi yang lebih baik untuk memprcepat proses implementasi program dan Faktor-faktor yang tak terkendali yang dialami oleh para implementor adalah faktor dana dan faktor alam yang juga termasuk faktor-faktor yang sangat mempengaruhi proses implentasi SPM Dikdas.

b. Nurlatifah Hidayati, R. Gunawan Sudarmanto, Irawan Suntoro. 2013. Implementasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Di Sekolah Dasar. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) SPM di Sekolah Dasar telah berjalan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Indonesia yang rata-rata memenuhi kriteria untuk menentukan SPM sesuai tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan No 15 tahun 2010, (2) evaluasi pelaksanaan SPM di sekolah Dasar telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan, (3) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di adalah partisipasi masyarakat kurang aktif dan kurangnya komunikasi antara orang tua dan sekolah, (4) partisipasi masyarakat dukungan dalam pelaksanaan SPM di Sekolah Dasar kurang maksimal, sementara dukungan utama dalam bentuk dukungan moral dan material maksimum.

c. Tazqy Hidayat. 2015. Implementasi Kebijakanstandar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah Di Smp Negeri 3 Kota Tarakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada 6 (enam) standar pelayanan minimal pendidikan yang harus dipenuhi oleh SMP Negeri 3 Kota Tarakan yaitu standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kurikulum, standar penjaminan mutu pendidikan, standar penilaian pendidikan, dan yang terakhir ialah standar manajemen sekolah. Dari 6 standar yang telah ditetapkan pemerinta, ada 3 (tiga) standar yang belum terpenuhi yaitu standar sarana dan prasaran, khususnya pada indikator ketersediaan buku tulis, standar kurikulum khususnya pada indikator guru yang menerapkan RPP, dan standar penjaminan mutu pendidikan khususnya pada indikator kegiatan kunjungan pengawas. Adapun faktor pendukung dari proses kebijakan standar pelayanan minimal di SMP Negeri 3 Kota Tarakan ialah adanya sistem moving class. Selain itu faktor penghambatnya ialah tidak tersediaanya buku pelajaran, guru yang menerapkan RPP kegiatan kunjungan pengawas ke sekolah.

Dari penelitian terdahulu yang mendekati penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Teguh Prasetya, Muslih Faozanudin, Dyah Retna Puspita. 2018.Dalam penelitian ini memiliki kesamaan tentang Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan di Sekolah Menengah Atas. Namun penelitian yang dilakukan dalam pnelitian ini lebih memfokuskan pada Standar Pelayanan Minimal Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor.

C. Alur Pikir

Alur pikir penelitian dapat digambarkan pada kerangka berfikir dan merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini akanmengkaji tentang implementasi Standar Pelayanan Minimal Sarana dan Prasarana Pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

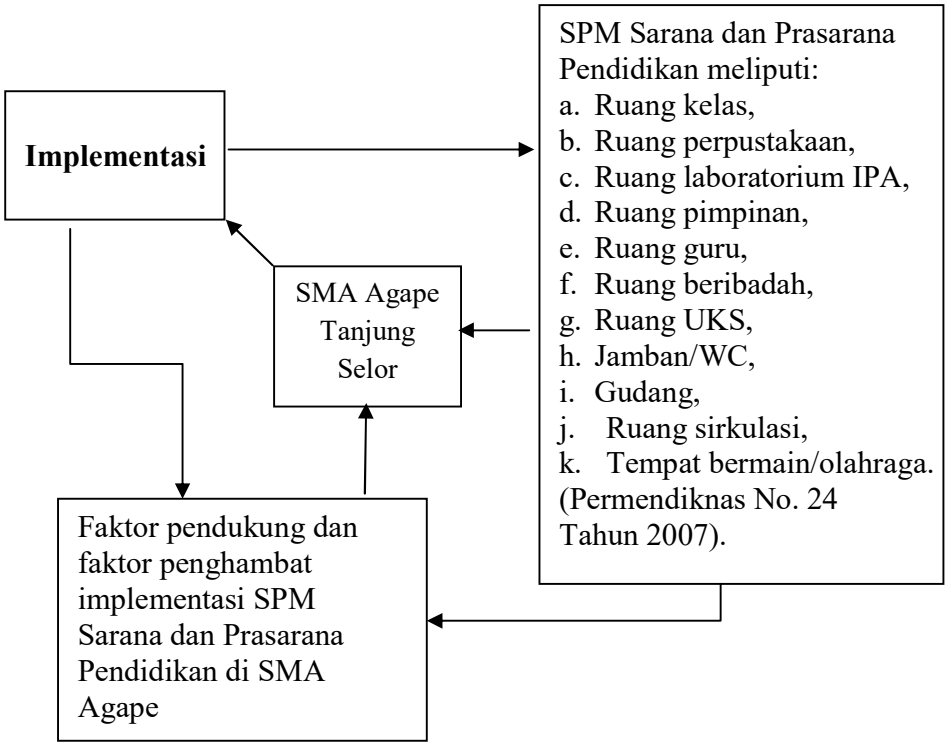

Gambar 2.1 Kerangka Alur Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif memaparkan dan menggambarkan segala peristiwa yang diperoleh dilapangan sesuai dengan masalah yang dirumuskan serta datanya yang bersifat kualitatif yaitu, yang menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.Yang dimaksudkan dengan penelitian kualitatif adalah angka penelitian ilmiah yang menyandarkan kebenaran pada sisi kriteria ilmu empiris yang berusaha untuk mengeksploritasi, mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksikan kejadian-kejadian pada setting sosial.Pertanyaan-pertanyaan ilmu empiris yang memiliki kebenaran ilmu harus cocok dengan fakta pengalaman yang didukung oleh evideni (bukti) empiris, Djam'an Satori dkk, (2009: 24).

Menurut Kirk dan Miler dalam Moleong (2006: 64) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam suatu pengetahuan ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan peristilahannya.

Sesuai dengan pendapat di atas, hubungannya dengan penelitian ini adalah untuk membentuk gambaran atau lukisan secara deskriptif dan faktual

dan akurat secara spesifik dan realistis mengenai implementasi standar pelayanan minimum sarana dan prasarana pendidikandi SMA Agape Tanjung Selor.

B. Penetapan Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SMA Agape Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting digunakan dalam penelitian agar dalam pengumpulan data lebih efektif dan efisien, sehingga penggunaan waktu akan lebih akuran karena sudah difokuskan. Adapun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Standar Pelayanan Minimum Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor.
2. Faktor Pendukung dan faktor penghambat implementasi SPM Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA AGAPE.

D. Pemilihan Informan

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, apabilah peneliti mengunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong 2006: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dua jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya-jawab secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian.

   Adapun daftar responden dalam penelitian adalah sebagai berikut :

   a. Kepala sekolah,
   b. wakil kepala sekolah,
   c. guru, waka karikulum
   d. Orang Tua/Wali Siswa

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber informasi antara lain melalui :

   a. Dokumen-dokumen.
   b. Buku-buku referensi, hasil penelitian dan media masa yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan beragam instrumen. Menurut Sugiyono (2013: 62) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai instrument untuk mengumpulkan data sesuai dengan metode penelitian.Dalam penelitian ini,

penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu:

1. Observasi

Menurut Nasution (1988) yang di kutip kembali oleh Sugiyono (2013:64) Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan dapat berkerja hanya berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi".

Berdasarkan keterlibatan penulis dalam mengobservasi, maka observasi yang digunakan yaitu observasi partisipatif. Menurut Sanafiah Faisal (1995) yang di kutip kembali oleh Sugiyono (2013: 64) Observasi partisipatif, dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang di amati atau yang sedang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Observasi dilakukan secara langsung kelapangan dan mengamati terkait kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Wawancara dimaksudkan sebagai upaya memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai *(informan).*Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur dengan pertanyaan yang terfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam.

Menurut Sugiyono (2013:72) “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan suatu permasalahan yang harus diteliti serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam”.Wawancara dilakukan dengan responden untuk mengetahui dan mendapatkan data mengenai implementasi Standar Pelayanan Minimum sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor.

3. Dokumentasi

Cara lain untuk memperoleh data dari responden dengan menggunakan teknik dokumentasi. Surachmad (2005: 132), mengatakan bahwa sebuah teknik dapat disebut historis ataupun dokumentasi bila penyelidikan ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu menjadi sumber-sumber dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang implementasi Standar Pelayana Minimum Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor.

Sedangkan menurut Sugiyono (2010: 329) “Menyatakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang”.Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa dokumen terkait kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam

Sugiyono (2013: 91) yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya.Analisis data yang digunakan adalah analisis data model alir melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Adapun penjelasan dari gambar model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013: 91-99) sebagai berikut:

1. **Pengumpulan Data**

   Pengumpulan Data adalah data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan sesara langsung terkait dengan wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang sudah ditentukan.

2. **Reduksi Data**

   Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan yang tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lapangan kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-tema, membuat gugus, membuat pertisi, menulis memo dan selanjutnya dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh dilapangan, kemudian dari data itu mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Reduksi data/proses transformasi itu berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara penelusuran atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan/*Verifikasi*

Penarikan Kesimpulan merupakan suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Sedang verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama peneliti mencatat atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran antara teman sejawat untuk mengembangkan "kesempatan inter subjektif" dengan kata lain makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya (validitasnya).

Verifikasi dalam penelitian dilakukan secara kontinyu sepanjang penelitian verifikasi oleh peneliti, dimaksudkan untuk menganalisis dan mencari makna dari informasi yang dikumpulkan dengan mencari tema, pola hubungan, permasalahan yang muncul, hipotesa yang disimpulkan secara tetatif, sehingga terbentuk proposisi tertentu yang bisa mendukung teori ataupun penyempurnaan teori. Dengan didukungnya teori dan penyempurnaan teori maka dapat disimpulkan mengenai implementasi

Standar Pelayanan Minimum Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor.

Adapun analisis data kualitatif model interaktif menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013: 92) dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

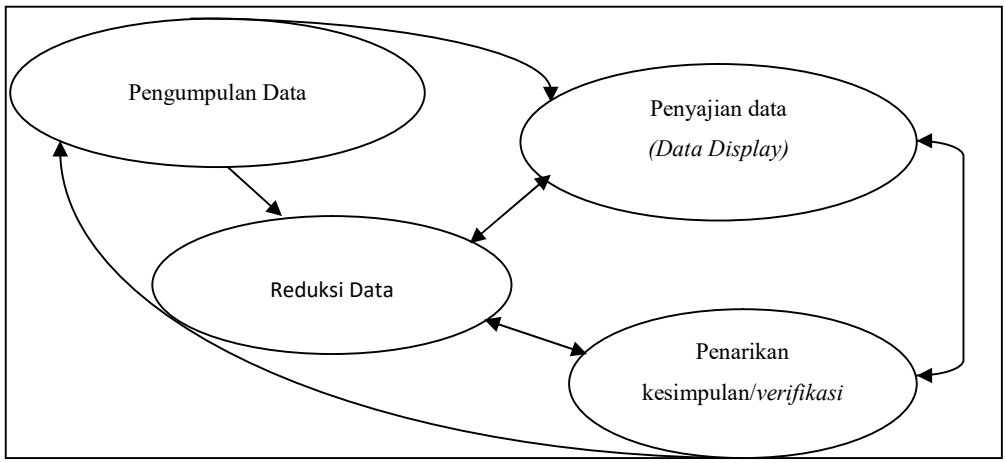

Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif: Model Interaktif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil SMA AGAPE Tanjung Selor

SMA AGAPE Tanjung Selor alamat Jalan Salak Tanjung Selor Rt, 16 Desa/ Kelurahan Tanjung Selor. Wilayah Kabupaten, Kabupaten/Kota Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Status Sekolah Swasta, status kepemilikan Yayasan, Sk / Izin pendirian sekolah Nomor 1006/126.2a/1e/1987, Sk Status Sekolah Terakhir Nomor 195/Bas-S/M/Ot/Xi/2011. Akreditasi SMA Agape Tanjung Selor predikat A, dan Alamat Email**:** Smaagapetanjungselor@Yahoo.Co.Id.

Tabel 4.1 Buku dan Alat Pendidikan

No.	Mata Pelajaran	Buku Pelajaran				
		Pegangan Guru		Teks Siswa		Penunjang
		Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar	Jumlah Judul	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar
1	PPKn	3	225	3	5	8
2	Pendidikan Agama .	3	90	3	2	600
3	Bahasa dan Sastra Indonesia	3	232	3	5	75
4	Bahasa Inggris	3	262	3	3	60
5	Pendidikan Jasmani	3			14	28
6	Matematika	3	428	7	7	43
7	IPA: a. Fisika	2	130	2	15	386
	b. Biologi	2	105	3	3	79
	c. Kimia	2	140	3	4	77
8	IPS: a. Ekonomi	3	54	4	7	14
	b. Sosiologi	2	160	2	5	15
	c. Geografi	3	150	2		
	d. Sejarah Budaya	2	35	1		

	e. Tata Negara			3		
	f. Antropologi	2		1		
	Pendidikan Seni	3				
9	Muatan Lokal	3	6	3		

Data: Kantor TU SMA AGAPE 2021

Berdasarkan pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jaumlah buku yang dipersiapkan oleh sekolah SMA AGAPE TAnjung Selor sudah memenuhi standar bahwa jumlah buku melebihi dari jumlah siswa. Buku-buku yang disediakan dapat dipinjamkan oleh siswa untuk dipelajari di perpustakaan, di kelas, ataupun di rumah. Dengan ketersediaan buku penunjang tersebut, proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Namun disisi lain, perlu dikembangkan bahwa buku untuk kurikulum K13 masih sangat terbatas, oleh karena itu SMA Agape sangat menharapkan bantuan dari pemerintah untuk mengadakan buku kurikulum 13.

Tabel 4.2 Perlengkapan Kegiatan Administrasi ;

No.	Jenis Perlengkapan	Jumlah Total	Kondisi Baik	Rusak Sedang
1	Komputer Desktop	2 unit	2 unit	unit
	a. Core Duo / lebih	0 unit	unit	unit
	b. Pentium 4	0 unit	unit	unit
	c. Pentium 3 / kurang	0 unit	unit	unit
2	Notebook / Laptop	1 unit	1 unit	unit
	a. Core Duo / lebih	0 unit	unit	unit
	b. Pentium 4	0 unit	unit	unit
	c. Pentium 3 / kurang	0 unit	unit	unit
3	Komputer Server	4 unit	4 unit	unit
4	Printer	2 unit	2 unit	unit
5	Scanner	2 unit	2 unit	unit
6	Telepon	1 unit	1 unit	unit
7	Faximile	1 unit	1 unit	unit
8	Fotokopi	1 unit	1 unit	unit
9	Mesin Stensil	0 unit	unit	unit

10	Mesin Ketik	3 unit	2 unit	1 unit
11	Kamera Digital	1 unit	1 unit	unit
12	Kamera Video / *handycam*	1 unit	unit	unit

Data: Kantor TU SMA AGAPE 2021

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa Perlengkapan Kegiatan Administrasi yang sudah ada berdasarkan pada tabel sudah memenuhi dan dapat difungsikan untuk melaksanakan administrasi. Perlengkapan yang sudah ada merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Bulungan.

Tabel 4.3 Perlengkapan Kegiatan Pembelajaran (ruang teori dan praktek) ;

No.	Jenis Perlengkapan	Jumlah		Kondisi Baik		Rusak Sedang	
1	Komputer Desk Top	24	unit	20	unit	4	unit
	a. Core Duo / lebih	0	unit		unit		unit
	b. Pentium 4	0	unit		unit		unit
	c. Pentium 3 / kurang	0	unit		unit		unit
2	Notebook / Laptop	0	unit		unit		unit
	a. Core Duo / lebih	0	unit		unit		unit
	b. Pentium 4	0	unit		unit		unit
	c. Pentium 3 / kurang	0	unit		unit		unit
3	Komputer Server	0	unit		unit		unit
4	Jaringan Internet	1	unit	1	unit		unit
5	Jaringan Intranet Sekolah	1	unit	1	unit		unit
6	LCD/Proyektor dan layar	1	unit	1	unit		unit
7	*Sound System* Ruangan	1	unit	1	unit		unit
8	Printer	1	unit	1	unit		unit
9	Scanner	0	unit		unit		unit
10	Kamera Digital/Handycam	0	unit		unit		unit
11	Televisi / LCD / LED	0	unit		unit		unit
12	Pendingin Ruangan (AC)	1	unit	1	unit		unit

Data: Kantor TU SMA AGAPE 2021

Perlengkapan Kegiatan Pembelajaran yang sudah ada masih kurang, terutama pada proyektor dan jaringan internet yang masih terbatas. Mengingat perlengkapan mengajar tersebut sangat dibutukan oleh sekolah, guru pada

khususnya, maka sekolah berupaya untuk menglengkapi peralatan atau perlengkapan mengajar ditahun mendatang.

Tabel 4.4 Tenaga Pendidik SMA Agape Tanjung Selor

No.	Mata Pelajaran	Jumlah Guru Yang Ada			Kebutuhan Tenaga Guru
		Guru Tetap	Guru Tidak Tetap	Jumlah Guru	
1	PPKn	1	1	2	2
2	Pendidikan Agama:				
	Pendidikan Agama Islam	1	1	2	2
	Pendidikan Agama Protestan		2	2	2
	Pendidikan Agama Katolik		1	1	1
3	Bahasa dan Sastra Indonesia		2	2	2
4	Bahasa Inggris	1	1	2	2
5	Sejarah Nasional dan Umum	1	1	2	2
6	Pendidikan Jasmani	1	1	2	2
7	Matematika		2	2	2
8	Fisika		1	1	1
9	Biologi	1		1	1
10	Kimia		1	1	1
11	Ekonomi	1	1	2	2
12	Sosiologi	1	1	2	2
13	Geografi	1		1	1
14	TIK		2	2	2
15	Pendidikan Seni	1	1	2	2
16	Bimbingan dan Konseling	2		2	2
17	Muatan Lokal	1		1	1
Jumlah		13	19	32	32

Data: Kantor TU SMA AGAPE 2021

Tenaga Pendidik SMA Agape Tanjung Selo berjumlah 32 orang yang terdiri dari guru tetap dan guru tidak tetap. Guru tetap merupakan guru yang sudah diberikan SK dan mereka sudah lama mengajar di SMA AGAPE. Sedangkan guru tidak tetap yaitu guru yang datang mengajar dari instansi lain. Berdasarkan pada tabel dapat diketahui bahwa jumlah guru tetap mencapai 13

orang, sedangkan guru tidak tetap mencapai 19 orang. Keberadaan guru tidak tetap sangat mendukung keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Agapa Tanjung Selor, mengingat bahwa guru tetap masih sangat terbatas. Rata-rata guru mengajar sudah berlatar belakang pendidikan keguruan dan mereka diberi tugas sesuai dengan latar belakang pendidikan guru.

Tabel 4.5 Ketersediaan Tenaga Kependidikan :

No	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan Yang Ada		
		Tenaga Tetap	Tenaga Tidak Tetap	Jumlah Tenaga Kependidikan
Tenaga Kependidikan				
1	Tenaga TU/Administrasi	4		4
2	Tenaga Pustakawan	2		2
3	Tenaga Laboran			0
4	Tenaga Kebersihan	2		2
Jumlah		7	0	7

Data: Kantor TU SMA AGAPE 2021

Tenaga kependidikan di SMA Agapa Tanjung Selor masih terbatas, terutama pada tenaga laboratorium sekolah. Tetapi tenaga kepandidikan di TU/bagian admin sudah cukup dan sudah dibagikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, ada bendahara, ada bagian kepegawaian, ada bagian kesiswaan dan ada bagian pendataan surat dan perlengkapan.

Tabel 4.6 Siswa menurut Program Pengajaran dan Kelas/Rombongan Belajar

Tingkat dan Program Pengajaran	Jumlah Siswa (orang)			Jumlah Rombongan Belajar	
	Laki-Laki	Perempuan	L + P		
Kelas X	24	20	24	2	Rombel
Kelas XI	35	33	68	2	Rombel
Kelas XII	24	23	47	2	Rombel
Total	83	76	159	6	Rombel

Data: Kantor TU SMA AGAPE 2021

Berdasarkan pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa jumlah siswa SMA Agape Tanjung Selor mencapai 156 siswa. Dimana jumlah siswa kelas X mencapai 24 siswa, siswa kelas XI mencapai 68 siswa, sedangkan kelas XII mencapai 47 siswa. Jumlah yang paling banyak siswa kelas XI. Siswa SMA Agape Tanjung Selor moyoritas berasal dari desa-desa yang ada di daerah Kabupaten Bulungan.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan deskripsi hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang disesuaikan pada rumusan masalah:

1. Implementasi Standar Pelayanan Minimum Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di SMA Agape Tanjung Selor

Berikut ini data hasil penelitian tentang implementasi standar pelayanan minimum sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor yaitu :

a. Ruang Kelas

Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Ruang kelas diwajibkan setiap satuan pendidikan yang untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan efaktif. SMA Agape Tanjung Selor dalam penerapan standar minimal ruang kelas dapat dikatakan sudah terpenuhi.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pak Yunus Banga selaku Kepala Sekolah SMA Agape Tanjung Selor mengatakan tentang standar minimal ruang kelas yaitu….

> Implementasi standar pelayanan minimal ruang kelas di SMA agape sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu Ruang Teori/Kelas dengn ukuran panjang 9 meter dan lebar mencapai 8 Meter (wawancara 5 September 2021).

Ruang kelas untuk proses pembelajaran di SMA Agape Tanjung Selor tergolong besar karena melebihi dari standar minimal yang ditetapkan, standar minimal yang ditetapkan kapasitas maksimum ruang kelas 28 peserta didik, sedangkan ruang kelas di SMA Agape bisa mencapai 30-40 siswa.

Sedangkan menurut bu Asri Pare Sapan, S.Pd selaku Waka Kesiswaan SMA Agape Tanjung Selor menyampaikan bahwa…

> Menurut saya ruang belajar di SMA Agape Tanjung Selor sudah memenuhi standar karena ukurannya besar dan bisa memuat siswa sampai 40 siswa (wawancara 5 September 2021).

Selanjutnya menurut Asna Tulusi, S.Sos selaku Kasubag. Tata Usaha SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa…

> Ruang kelas di SMA Agapee Tanjung Selor banyak, bahkan ada yang kosong karena siswanya kurang, jadi ruang kelas untuk siswa sudah memenuhi standar karena ruangnya sudah tersedia(wawancara 5 September 2021).

Luas minimum ruang kelas 30 m^2/ lebar minimum ruang kelas 5 meter, sedangkan di SMA Agape Tanjung Selor panjang 9 meter, lebar 8 meter, dan ruang kelas memiliki fasilitas yang pencahayaan memadai

untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.

Untuk menegaskan pendapat tersebut di atas, penelit melakukan wawancara dengan bu Aren Anyan, S.Pd selaku Waka Kurikulum SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa….

> Ya menurut saya, ruang kelas sudah bagus dan memiliki pintu yang memadai dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan. Ruangannya juga luas dan ada sebagian ruang kelas tidak digunakan (wawancara 6 September 2021).

Ketersediaan dan luas ruang kelas di SMA Agape Tanjung Selor sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Beberapa ruang kelas tidak digunakan karena jumlah siswa kurang, sedangkan jumlah ruangan kelas masih ada yang kosong. Jumlah ruang kelas yang disediakan oleh SMA Agape Tanjung Selor mencapai 10 kelas tetapi yang digunakan hanya 6 ruangan, dimana kelas X dua kelas, kelas XI dua kelas, dan kelas XII dua kelas.

b. Ruang Perpustakaan

Ruang perpustakaan adalah tempat dimana buku-buku disimpan dan dibaca. Disana guru dan peserta didik dapat memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan cara membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.

Berikut ini hasil wawancara dengan informan tentang standar minimal ruang perpustakaan di SMA Agape Tanjung Selor. Yang pertama yaitu wawancara dengan bu Florens Semuel, S.Pd selaku

penjaga perpustakawan SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa…

> Ya menurut saya implementasi standar pelayanan minimal ruang perpustakaan di SMA Agape Tanjung Selor sudah memenuhi standar minimal karena ukuran ruang perpustakaan mencapai lebar 8 meter, dan panjang 8 meter. (wawancara 6 September 2021).

Ruang perpustakaan dikatakan memenuhi standar karena standar minimal perpustakaan lebar minimum 5 meter, sedangkan di SMA Agape Tanjung Selor mencapai 8x8 meter, dan dilengkapi dengan buku belajar yang memadai. Selain itu, ruang perpustakaan SMA Agape Tanjung Selor dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.

Selanjutnya menurut pak Semuel K, S.Pd selaku Guru BP / BK SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa…

> Ruang perpustakaan di SMA Agape Tanjung Selor sudah sangat layak, karena cukup besar, dan dilengkapi dengan buku yang begitu banyak mencapai 6000 buku. (wawancara 6 September 2021).

Menurut Yunus Banga selaku Kepala Sekolah SMA Agape Tanjung Selor mengatakan tentang standar minimal ruang perpustakaan yaitu….

> Menurut saya ruang perpustakaan sudah layak dan dapat dikatakan memenuhi standar pelayanan minimal, dan sudah dilengkapi dengan buku-buku belajar. Luas ruangannya mencapai 8x8 meter. (wawancara 5 September 2021).

Dari peryataan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementtasi standar pelayanan minimal ruang perpustakaan di SMA Agape Tanjung Selor sudah memenuhi standar minimal, dimana ukurannya mencapai 8x8 meter. Sedangkan dalam aturan yang ditetapkan bahwa standar menimal ruang perpustakaan pada satuan pendidikan minimum mencapai 5 meter.

c. Ruang Laboratorium IPA

Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan. Ruang laboratorium merupakan ruang pendukung proses pembelajaran yang dapat digunakan untuk kegiatan praktek. Untuk memenuhi standar minimal satuan pendidikan berkewajiban menerapkan dan memiliki raboratorium dan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai.

Berikut hasil wawancara dengan informan tentang standar ruangan laboratorium IPA di SMA Agape Tanjung Selor. Menurut Asri Pare Sapan, S.Pd selaku Waka Kesiswaan SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa…

> Implementasi standar pelayanan minimal ruang laboratorium di SMA Agape Tanjung Selor belum memenuhi standar, karena ruangnya dalam keadaan rusak dan sarana serta perlengkapan juga belum tersedia (wawancara 5 September 2021).

Menurut bu Asna Tulusi, S.Sos selaku Kasubag. Tata Usaha SMA Agape Tanjung Selor ,mengatakan bahwa…

> Selama ini ruang laboratorium IPA dalam kondisi tidak layak pakai sehingga belum bisa dikatakan memenuhi standar minimal (wawancara 5 September 2021).

Ruang laboratorium belum memenuhi standar karena kondisi saat ini tidak layak digunakan, sarana dan peralatan IPA yang digunakan peserta didik belum lengkap. Kondisi tidak layak tersebut disebabkan karena bencana alam/banjir sehingga ruang dan peralatan yang ada tidak dapat digunakan kembali.

Selanjutnya menurut bu Aren Anyan, S.Pd selaku Waka Kurikulum SMA Agape Tanjung Selor yaitu ….

> Ruang laboratorium IPA belum tersedia dengan baik dan sarana atau perlengkapan lap juga belum ada (wawancara 6 September 2021).

Ditegaskan oleh pak Yunus Banga selaku Kepala Sekolah SMA Agape Tanjung Selor mengatakan tentang standar minimal ruang laboratorium IPA yaitu…

> Kondisi ruang laboratorium IPA tidak layak digunakan dan perlengkapannya juga tidak tersedia dengan baik. Salah satu program pembangun sekarang ini yaitu membangun ruang laboratorium IPA dan melengkapi paralatan dan perlengkapan praktikum (wawancara 5 September 2021).

Dari peryataan tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa ruang laboratorium IPA SMA Agape Tanjung Selor tidak memenuhi standar pelayanan minimal karena tidak layak digunakan dan peralatan

serta perlengkapan yang dibutkan dalam kegiatan praktek tidak memadai. Salah satu program pembangunan yang dilaksanakan sekarang yaitu pembangunan gedung laboratorium IPA.

d. Ruang Pimpinan

Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas Dinas Pendidikan, dan tamu lainnya.

Berikut ini hasil wawancara dengan bu Asri Pare Sapan, S.Pd selaku Waka Kesiswaan SMA Agape Tanjung Selor mengatakan tentang standar ruang pimpinan di SMA Agape Tanjung Selor yaitu :

> Menurut saya, standar ruang pimpinan SMA Agape Tanjung Selor sudah cukup besar dan difasilitasi dengan meja dan korsi dan sopa (wawancara 5 September 2021).

Selanjutnya menurut bu Asna Tulusi, S.Sos selaku Kasubag. Tata Usaha SMA Agape Tanjung Selor meyampaikan bahwa….

> Ruang kepala sekolah di SMA Agape Tanjung Selor sudah memenuhi standar karena ruangnya cukup besar dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 3 meter (wawancara 5 September 2021).

Ruang pimpinan dikatakan memenuhi standar karena sudah besar dari standar minimal yang ditentukan, dimana luas minimum ruang pemimpin 12 m^2 dan lebar minimum 3 meter. Ruang pimpinan sudah didesain sebaik mungkin oleh SMA Agape Tanjung Selor dengan tujuan tercapainya standar minimal yang sudah ditentukan.

Lebih lanjut wawancara dengan bu Aren Anyan, S.Pd selaku Waka Kurikulum SMA Agape Tanjung Selor beliau mengatakan bahwa…

> Ya, ruang pimpinan sudah memenuhi standar pelayanan minimal dan mudah diakses oleh guru serta tamu sekolah, dapat dikunci dengan baik (wawancara 6 September 2021).

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi standar pelayanan minimal ruang pimpinan sudah memenuhi standar minimal, dimana ruang kepala sekolah lebih besar dari standar minimal yang ditentukan. Selain itu ruang kepala sekolah sudah dilengkapi dengan kursi, meja dan lemari. Selain itu ruang kepala sekolah mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah karena letak ruang pimpinan berada di tenga atau berdekatan dengan ruang guru.

e. Ruang Guru

Ruang guru SMA Agape Tanjung Selor memiliki fungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. Ruang guru difasilitasi dan dilengkai dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai, berisi bangku, meja dan sopa untuk tamu sekolah.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan infoman tentang standar minimal ruang guru di SMA Agape Tanjung Selor. Menurut Yunus Banga selaku Kepala Sekolah SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa….

> Menurut saya, ruang guru SMA Agape Tanjung Selor sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditentukan, dimana luas ruangan tersebut panjang 12 meter dan lebar 8 meter (wawancara 5 September 2021).

Dalam standar minimal ruang guru yaitu rasio minimum luas ruang guru 4 m^2/pendidik dan luas minimum 32 m^2 . yang artinya bahwa standar minimal ruang guru yang harus ada dan dimiliki oleh satuan pendidikan mencapai 8x8 mater. Sedangkan di SMA Agape Tanjung Selor panjang ruangan mencapai 12 meter dan lebar mencapai 8 mater.

Lebih lanjut menurut bu Rosti selaku wali siswa SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa….

> Menurut saya, ruang guru bagus dan layak karena dilengkapi dengan korsi, bangku dan lemari. Ruang guru luas dan terlihat cukup untuk guru SMA Agape Tanjung Selor beristirahat serta mengerjakanpekerjaan mereka (wawancara 5 September 2021).

Ditegakan oleh Florens Semuel, S.Pd selaku Perpustakawan SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa …..

> Ruang guru SMA Agape Tanjung Selor luas dan semua guru yang mengajar mendapatkan fasilitas korsi dan meja untuk bersistirahat. Selain itu, mudah dijangkau dan dekat dengan ruang pimpinan. (wawancara 6 September 2021).

Dari peryataan tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa ruang guru yang berfungsi untuk tempat istirahat dan bekerja sudah memenuhi standar pelayanan minimal karena luarnya sudah melebihi dari standar minimal yang ditentukan. Selain daripada itu, ruang guru sudah dipasilitasi meja dan korsi serta lemari.

f. Ruang Beribadah

Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah SMA Agape Tanjung Selor melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama. Ruang ibadah di SMA Agape Tanjung Selor sudah difasilitasi dengan baik. Ruang ibadah yang difasilitasi yaitu, ada ruang ibadah untuk yang beragama Kristen Protestan, Katolik, dan agama Islam.

Berikut hasil wawancara dengan bu Aren Anyan, S.Pd selaku Waka Kurikulum SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa….

> Ruang ibadah di SMA Agape Tanjung Selor sudah layak karena kita memfasilitasi ruang kelas untuk kegiatan beribada. Ruang kelas terebut sudah kosong dan tidak digunakan untuk ruang kelas. (wawancara 6 September 2021).

Ruang ibdada tidak ada khusus karena Ruang kelas sebagai ruang ibadah. Dalam kegiatan akrditasi ruang ibadah tidak dipermasalakan karena sudah ada ruang kelas yang kosong dapat digunakan oleh siswa. Ruang ibada tersebut mudah diakses dan tempatnyapun sejuk.

Selanjtnya menurut bu Bita, S.Pd selaku Guru SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa…

> Ruang ibada untuk guru dan siswa sudah disediakan baik untuk yang beragama islam ataupun Kristen. Ruangan yang digunakan ruang kelas yang tidak dijadikan sebagai tempat proses pembelajaran. Ruang ibada tersebut sangat luas karena berukuran 9x8 meter (wawancara 6 September 2021).

Dipertegas oleh Semuel K, S.Pd selaku Guru BP / BK SMA Agape Tanjung Selor bahwa…

> Ruang ibadah sudah memenuhi standar pelayanan minimal karena ukurannya lebih besar dari standar standar minimum 12 m^2 yang ditentukan. (wawancara 6 September 2021).

Dari beberapa hasil wawancara dengan informan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa ruang ibadah di SMA Agape Tanjung Selor sudah memenuhi standar pelayanan minimal karena luasnya melebihi dari standar pelayanan minimal yang ditentukan.

Gambar 4.1 Ruang Ibada SMA Agape Tanjung Selor

dari hasil observasi yang peneliti lakukan dapat dijelaskan bahwa ruang ibadah untuk yang beragama islam sudah layak digunakan karena luas, dan untuk yang beragama Kristen dan hinduataupun Budah sudah disediakan juga.

g. Ruang UKS

Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan sekolah di SMA Agape Tanjung Selor. Ruang UKS dipasilitasi sekolah dengan tujuan agar siswa yang mendapatkan gangguan kesehatan segera dapat ditolong. Ruang UKS di SMA Agape Tanjung Selor juga dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Berikut ini hasil wawancara dengan bu Florens Semuel, S.Pd selaku Perpustakawan SMA Agape Tanjung Selor mengatakan tentang standar minimal ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yaitu….

> Sekolah SMA Agape Tanjung Selor sudah memiliki UKS dan luasnyapun sudah memenuhi standar minimal dengan ukuran pangjang 4 meter, lebar 3 meter.(wawancara 6 September 2021).

Ruang UKS dibuat oleh SMA Agape Tanjung Selor dengan tujuan untuk memenuhi standar yang ditetapkan sehingga pada saat akreditasi, ruang UKS mendapatkan penilaian sesuai dengan standar minimal. Pada dasarnya, setiap satuan pendidikan harus memiliki ruang UKS dan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai sehingga ketika ada peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan, dengan segera dapat ditolong. Raung UKS juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling sehingga pesert didik yang mengalami masalah dapatdiberikan pembinaan dan pengarahan.

Selanjutnya disampaikan oleh Semuel K, S.Pd selaku Guru BP / BK SMA Agape Tanjung Selor bahwa….

> Ya…menurut saya ruang UKS di SMA Agape Tanjung Selor sudah sangat baik karena ruangnya cukup besar dan ada peralatan kotak P3K yang siap digunakan (wawancara 6 September 2021).

Petugas di ruang UKS sudah ada dan tugasnya menydiakan obat isi kotak P3K seperti betadin handiplas dan obat luka lainnya. Selain bertugas untuk mempersiapkan obat-obat, petugas juga memberikan konseling kepada peserta didik yang mengalami masalah.

Ditegaskan oleh pak Yunus Banga selaku Kepala Sekolah SMA Agape Tanjung Selor mengatakan tentang standar layanan minimal ruang UKS di SMA Agape Tanjung Selor yaitu…

> Ruang UKS sudah ada dan sudah memenuhi standar minimal, dimana ukuran yang disediakan lebih besar dari standar minimal yang ditetapkan(wawancara 5 September 2021).

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi standar minimal raung UKS di SMA Agape Tanjung Selor sudah memenuhi standar minimal. Dimana ruang yang disediakan mencapai 4x3 meter, sedangkan standar minimal yang ada dalam aturan yaitu luas minimun ruang UKS 12 m^2/3x3 meter

h. Jamban/WC,

Jamban di SMA Agape Tanjung Selor berfungsi sebagai tempat buang air besar dan kecil. Jamban/WC wajib dimiliki oleh satuan pendidikan dan disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Jamban/WC

yang baik tentunya dapat berfungsi dengan baik, ukuran yang luas, dan selalu bersih.

Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa informan tentang implementasi standar minimal jamban/WC di SMA Agape Tanjung Selor. Menurut Asri Pare Sapan, S.Pd selaku Waka Kesiswaan SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa…

> Menurut saya, implementasi standar minimal jamban/WC di SMA Agape Tanjung Selor belum memenuhi standar karena WC yang tersedia hanya 2 WC untuk siswa dan 1 WC untuk guru (wawancara 5 September 2021).

Jamban/WC di SMA Agape Tanjung Selor sangat terbatas atau masih kurang untuk guru ataupun untuk siswa. Seharusnya sekolah memfasilitasi jamban/WC untuk guru berjumlah 2 ruang untuk guru laki-laki dan untuk guru perempuan. Sedangkan jambat/WC untuk siswa masih kurang karena jumlah siswa di SMA Agape Tanjung Selor mencapai 169. Jadi jumlah jamban/WC yang harus disediakan untuk siswa mencapai 3 WC.

Sedangkan menuru bu Asna Tulusi, S.Sos selaku Kasubag. Tata Usaha SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa…

> Menurut saya jumlah jamban/WC untuk siswa di SMA Agape Tanjung Selor belum memenuhi standar karena hanya 2 WC. (wawancara 5 September 2021).

Standar minimal yang harus dipenuhi oleh SMA Agape Tanjung Selor harus 3 jamban/WC karena jumlah siswa banyak. Dimana standar

minimun 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita dan 1 unti untuk guru.

Ditegaskan oleh pak Semuel K, S.Pd selaku Guru BP / BK SMA Agape Tanjung Selor bahwa…

> Implementasi standar minimal jamban/WC di SMA Agape Tanjung Selor belum terpenuhi karena jmlahnya sangat kurang, terkadang siswa mengantri untuk ke WC pada saat jam istirahat. (wawancara 6 September 2021).

Dari hasil wawancara tersebut dapatpeneliti simpulkan bahwa implemntasi standar minimal jamban/WC di SMA Agape Tanjung Selor belum memenuhi standar karena jumlah jamban kurang dari jumlah siswa yang ada di SMA Agape Tanjung Selor. Sedangkan luas jamban sudah lebih dari standar minimum 1 unit jamban 2 m^2 yang ditetapkan.

Adapun hasil observasi yang peneliti dokumentasikan dalam bentuk foto terkit dengan sarana WC/jamban sekolah SMA Agape Tanjung Selor sebagai berikut :

Gambar 4.2 WC/Jamban SMA Agape Tanjung Selor

Dari hasil observasi tersebut dapat diketahui bahwa keadaan wc siswa-siswa sekolah SMA Agape Tanjung Selor bisa dikatakan kurang layak karna jumlah yang masih kurang, kondisi yang kurang terwat sehingga perlu adanya penambahan WC dan perbaikan kondisi yang ada.

i. Gudang

Gudang di SMA Agape Tanjung Selor berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat penyimpanan sementara peralatan sekolah yang tidak/belum berfungsi dan tempat penyimpanan asrip sekolah yang telah berusia dari 5 tahun.

Berikut hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan implementasi standar minimal gudang di SMA Agape Tanjung Selor. Menurut pak Yunus Banga selaku Kepala Sekolah SMA Agape Tanjung Selor bahwa….

> Saya menilai bahwa standar minimal gudang di SMA Agape Tanjung Selor sudah memenuhi standar minimal karna kami memiliki 5 ruang gudang. Jika dihitung luasnya mencapai 12x12 meter, dimana lebih luas dari standar layanan minimal yang ditetapkan yaitu luas minimum gudang 18 m^2/4.5 meter (wawancara 5 September 2021).

Jumlah gudang di SMA Agape Tanjung Selor mencapai 5 gudang, dimana sebagian ruang kelas yang tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran difungsikan sebagai gudang.

Sedangkan menurut bu Aren Anyan, S.Pd selaku Waka Kurikulum SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa…

> Gudang di di SMA Agape Tanjung Selor sudah memenuhi standar karena jumlahnya banyak dan ruangannya masih kosong (wawancara 6 September 2021).

Dari beberapa hasil wawancara tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi standar minimal gudang di SMA Agape Tanjung Selor sudah memenhi standar karena luas dan jumlah ruangan melebihi dari standar minimal yang ditetapkan ditetapkan yaitu luas minimum gudang 18 m^2/4.5 meter.

j. Ruang Sirkulasi

Ruang sirkulasi horizontal di SMA Agape Tanjung Selor berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran. terutama pada saat hujan, ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegitan tersebut berlangsung di halaman sekolah.

Adapun hasil wawancara dengan bu Aren Anyan, S.Pd selaku Waka Kurikulum SMA Agape Tanjung Selor mengatakan tentang standar minimal ruang sirkulasi yaitu….

> Menurut saya ruang sirkulasi di SMA Agape Tanjung Selor sudah memenuhi standar, diman ruang sirkulasi tersebut menghubungkan antara ruang belajar yang ada (wawancara 6 September 2021).

Selanjutnya menurut bu Florens Semuel, S.Pd selaku Perpustakawan SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa….

> Implementasi standar minimal ruang sirkulasi di SMA Agape Tanjung Selor sudah memenuhi standar. Dimana ruang sirkulasi tersebut berukuran 2 meter melebihi standar minimal yang ditentukan yaitu 1,8 meter. (wawancara 6 September 2021).

Dalam aturan standar minimal ruang sirkulasi yang horizontal berupa koridor yang menghuungkan ruangan-ruangan di dalam bangunan sekolah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruangan pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi 2,5 meter.

k. Tempat Bermain/Olahraga

Tempat bermain atau berolahraga SMA Agape Tanjung Selor berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakulikuler. Tempat bermain atau berolahraga sangat penting dimiliki oleh sekolah SMA Agape Tanjung Selor dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kedisiplinan siswa dalam berolahraga.

Berikut ini hasil wawancara dengan pak Yunus Banga selaku Kepala Sekolah SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa.

> Implementasi standar minimal tempat bermain atau berolahraga SMA Agape Tanjung Selor belum bisa dikatakan layak karena berlumpur dan becek. Sedangkan luas temapt berolehraga sudah memenihi standar yaitu mencapai 25x50 meter, tetapi kondisinya tidak layak digunakan (wawancara 5 September 2021).

Luar tempat berolahraga siswa SMA Agape Tanjung Selor sudah terpenuhi akan tetapi tidak layak untuk digunakan karena kondisi lapangan tersebut berlumpur. Kondisi lapangan tidak layak digunakan oleh siswa SMA Agape Tanjung Selor disebabkan karena banjir dan air tergenang di lapangan.

Selanjutnya menurut bu Asri Pare Sapan, S.Pd selaku Waka Kesiswaan SMA Agape Tanjung Selor bahwa

> Standar pelayanan minimal tempat berolahraga/bermain siswa SMA Agape Tanjung Selor belum bisa dikatakan memenuhi standar layanan minimal karena lapangan berlumpur dan berumput. (wawancara 5 September 2021).

Ketika terjadi hujan, lapangan SMA Agape Tanjung Selor akan tergenang air hujan karena tidak ada irigasi atau paret untuk pembuangan genangan hujan tersebut. Proses untuk pengeringan lapangan bisa mencpai 3 dan 4 hari. Sangat disayangkan karena kondisi lapangan yang tidak layak digunakan untuk kegiatan bermain, padahal luas lapangan yang dimiliki SMA Agape Tanjung Selor cukup besar.

Berikut ini hasil observasi yang peneliti dokumentasikan sebagai berikut:

Gambar 4.3 Tempat Bermain/Olahraga SMA Agape Tanjung Selor

Dari Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa tempat bermain/olahraga siswa SMA Agape Tanjung Selor tidak layak digunakan karena lapangan yang sudah dicor tertutup oleh tanah. Ketika hujan turun, lapangan tersebut akan tergenang air hujan dan tanah yang menutupi permukaan cor akan menjadi lumpur.

Berikut hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti terkait dengan inventarisasi sarana dan prasaran sekolah SMA Agape Tanjung Selor.

Tabel 4.7 Prasarana SMA Agape Tanjung Selor

No.	Nama Ruang	Kode Prasarana Dikmen	Hak Milik Sekolah			Ket
			Jumlah Ruang atau Unit Bangunan	Panjang Ruang (meter)	Lebar Ruang (meter)	
1	Ruang Teori / Kelas *	01	10	9	8	Layak
2	Laboratorium IPA *	02	1	9	8	Tidak layak

3	Laboratorium Komputer *	08	1	16	8	Layak
4	Ruang Perpustakaan *	09	1	8	7	Layak
5	Ruang Perpustakaan	10	1	8	8	Layak
6	Ruang Keterampilan	12	1			Layak
7	Ruang Serba Guna/Aula	13	1			Layak
8	Ruang UKS	14	1	4	3	Layak
9	Koperasi/Toko	20	0			Layak
10	Ruang BP/BK	21	1	6	3	Layak
11	Ruang Kepala Sekolah	22	1	6	3	Layak
12	Ruang Wakil Kepala Sekolah	22	1	6	3	Layak
13	Ruang Guru	23	1	12	8	Layak
14	Ruang Tata Usaha	24	1	6	4	Layak
15	Ruang OSIS	25	1			Layak
16	Ruang Ekstra Kurikuler	42	1			Layak
17	Ruang PMR	43	1			Layak
18	Kamar Mandi Guru Laki	26	1	4	3	Kurang Layak
19	WC Perempuan	27	1			Kurang Layak
20	Kamar Mandi Siswa Laki	28	1	4	3	Kurang Layak
21	WC Siswa Perempuan	29	2	1	1	Kurang Layak
22	Gudang	30	5			Layak
23	Ruang Ibadah	31	1			Layak
24	Rumah Dinas Kepala Sekolah	32	1			Layak
25	Rumah Dinas Guru	33	3			Layak
26	Rumah Penjaga Sekolah	34	1			Layak
27	Dapur/Pantry	44	1			-
28	Kantin/Warung Sekolah	45	2			Perbaikan
29	Lapangan Olah Raga	46	1			Tidak Layak
30	Tempat Parkir	47	2			Layak

Data: Kantor TU SMA AGAPE 2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah ruang belajar/teori yang ada di SMA Agape Tanjung Selor sudah sesuai dengan jumlah siswa, dimana ruang belajar 10 ruang dan rata-rata siswa dalam satu rombel mencapai 28 siswa. Ruang laboratorium untuk siswa IPA melakukan kegiatan praktikum tetapi tidak layak untuk kegiatan praktikum. Ruang guru dan tenaga kependidikan sudah ada masing-masing guru sehingga guru dapat menjalankan aktivitasnya di kantor dengan nyaman. Ruang kepala sekolah terpisa dengan ruang guru dan ruang kepala sekolah juga ada tersendiri. Kamar mandi untuk guru dan siswa sudah dipisakan dan siswa memiliki kamar mandi berdasarkan jenis kelamin sehingga siswa/siswi tidak merasa terganggu ketika mereka menggunakan kamar mandi namun dari aspek kelayakan belum layak karena masih kurang dan kondisipun perlu diperbaiki. Untuk melaksanakan kegiatan keorganisasin siswa, sekolah menyediakan ruang khusus bagi OSIS SMA Agape Tanjung Selor untuk melaksankan atau menjalankan aktivitas siswa yang masuk di dalam OSIS.

2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi SPM Sarana Dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape

Implementasi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor belum dapat terwujud dengan sempurna. Namun di sisi lain, standar pelayanan minimal sarana prasarana pendidikan juga sudah tercapai disebabkan karena kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia yang ada.

Berikut ini hasil penelitian tentang faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi SPM sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung Implementasi SPM Sarana Dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape

Faktor pendukung dalam implementasi SPM Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor merupakan faktor yang mempengaruhi sehingga implementasi SPM Sarana dan prasarana pendidikan dapat terpenuhi dengan baik. SMA Agape Tanjung Selor mendapatkan akreditasi dengan kualifikasi A salah satunya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun hasil wawancara dengan pak Yunus Banga selaku Kepala Sekolah SMA Agape Tanjung Selor menyampaikan tentag faktor pendukung dalam implementasi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor yaitu …

> Menurut saya dalam implementasikan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai dalam menjaga dan mengelola sarana terebut, sehingga sampai sekarang tetap layak untuk digunakan. Selain itu, luas lahan SMA Agape Tanjung Selor juga faktor pendukung sehingga pebangunan untuk sarana dan prasarana sekolah dapat dikembangkan (wawancara 5 September 2021).

Kemampuan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sangat penting dengan tujuan semua sarana dn prasaran tersebut dapat diinpentarisasi dan dapat diketahui capaian standar yang harus dipenuhi. Serana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor harus dikelola dengan baik supaya dapat mmenuhi standar minimal yang ditetapkan. Walaupun dalam prakteknya, masih ada beberapa sarana yang belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Lebih lanjut disampaikan oleh bu Asri Pare Sapan, S.Pd selaku Waka Kesiswaan SMA Agape Tanjung Selor bahwa…

> Faktor pendukung dalam implementasi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor tidak terlepas dari kemampuan kami sebagai sumber daya yang bekerja di SMA Agape Tanjung Selor. Dimana semua sarana dan prasarana yang ada kami jaga dan kami data sehingga kami mengetahui kekurangan kami (wawancara 5 September 2021).

Selanjutnya ditegaska oleh bu Asna Tulusi, S.Sos selaku Kasubag. Tata Usaha SMA Agape Tanjung Selor bahwa…

> Faktor pendukungnya yaitu kemampuan kami dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor sehingga kami mengetahui kelemahan-kelemahan yang belum memenuhi standar. Selain itu faktor pendukung dalam mengimplementasikan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor yaitu karena siswanya cukup banyak dan pembangunan tetap bisa dikembangkan. Dalam tahun ini pembangunan LAP IPA dan lapangan olahraga akan dibangun,

serta adanya renovasi ruang kelas yang sudah tidak layak pakai (wawancara 5 September 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa faktor pendukung dalam mengimplementasikan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor yaitu :

1. Kemapuan Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia yang di di SMA Agape Tanjung Selor dapat dikatakan mampu dalam pengelolaan sarana dan prasaran pendidikan sehingga sebagian besar sarana dan prasarana yang ada memenuhi standar layanan minimal.

2. Keberadaan Siswa

   Siswa menjadi faktor pendukung dalam implementasikan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor karena semua sarana dan prasarana dapat dikelola dan dikembangkan serta dapat difungsikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam tahun ini pembangunan ruang laboratorium IPA akan dibangun, hal itu disebabkan karena kebutuhan sekolah dan siswa. Siswa yang banyak tentunya akan berdampak pada pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor.

3. Luas Lahan Sekolah SMA Agape Tanjung Selor

   Luas lahan merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasikan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana

pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor. Lahan yang dimiliki oleh sekolah SMA Agape Tanjung Selor cukup luas sehingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan masih sangat berpotensi. Lahan yang kosong masih tersedia. Salah satu program yang akan dilaksanakan tahun ini yaitu mambangun laboratorium IPA dan memperbaiki sarana olahraga.

b. Faktor Penghambat Implementasi SPM Sarana Dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape

Banyak satuan pendidkan, terutama sekolah swasta dalam mengimplementasikan standar layan minimal sarana dan prasarana mengalami kendala sehingga implementasinya tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan. Terutama di SMA Agape Tanjung Selor salah satu sekolah Swasta yang sudah sangat lama melaksanakan pendidikan, namun sampai sekrang tetap saja ada faktor kendala dalam implementasi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan.

Berikut ini hasil wawancara dengan informan yang ditentukan oleh peneliti terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor

Menurut pak Yunus Banga selaku Kepala Sekolah SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa…

> Salah satu faktor penghambatnya yaitu keterbatasan dana sekolah untuk membangun sarana yang belum sesuai dengan standar layanan minimal yang ditentukan. Selain itu,

> perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta juga masih kurang, dimana sekolah-sekolah negeri sudah memiliki sarana dan prasarana memadai (wawancara 5 September 2021).

SMA Agape Tanjung Selor selama ini hanya mengharapkan dana dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk pembangunan sarana. Sekolah SMA Agape tidak memiliki sumber pendapatan selain dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karena itu, ketika pemerintah daerah tidak mengalokasikan dana untuk pembangunan sarana di SMA Agape Tanjung Selor, maka selama itu juga sarana dan prasarana tidak akan berkembang.

Selanjutnya menurut bu Asri Pare Sapan, S.Pd selaku Waka Kesiswaan SMA Agape Tanjung Selor mengatakan tentang faktor penghambat implementasikan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor yaitu…

> Ada beberapa sarana dan prasarana yang kami miliki tidak sesuai dengan standar layanan minimal. Kami mau membangun sarana tersebut, tetapi dana atau uang sekolah tidak memadai. Uang sekolah yang ada cukup untuk operasional sekolah saja.(wawancara 5 September 2021).

Lebih lanjut menurut bu Asna Tulusi, S.Sos selaku Kasubag. Tata Usaha SMA Agape Tanjung Selor mengatakan bahwa…

> Selama ini saya perhatikan bahwa sekolah Swasta terutama SMA Agape Tanjung Selor kurang diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sarana dan prasarana kami masih terbatas seperti lapangan olahraga, jamban, dan ruang laboratorium IPA. Kami tidak bisa membangun itu

semua karena kami tidak memiliki dana. (wawancara 5 September 2021).

Dari penjelasan tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa faktor penghambat dalam implementasikan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor yaitu :

1. Dana Sekolah

SMA Agape Tanjung Selor terbatas dengan dana sekolah yang ada. Selama ini, sekolah hanya mengandalkan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) utuk menggaji guru, dan membelih peralatan dan perlengkapan kegiatan pembelajaran. Dana untuk membangun sarana dan prasarana sekolah tidak ada karena sekolah tidak memiliki sumber pendanaan lain, selain dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam tahun ini (2021), sekolah mendapatkan dana pembangunan LAP dan merenovasi sekolah sebesar Rp.1000.000.000, tetapi dana tersebut tidak dikelolah secara langsung oleh pihak sekolah tetapi dikelolah oleh pemborong/ proyek.

2. Perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kalimantan Utara, salah satu yang harus diperhatikan yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus mampu meningkatkam pambangunan yang merata bagi setiap

satuan pendidikan. Namun selama ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara lebih terpusat kapada sekolah-sekolah negeri , dan kurang memperhatikan sekolah-sekolah swasta, salah satunya yaitu SMA Agape Tanjung Selor. SMA Agape Tanjung Selor sudah lama beroperasi tetapi sarana dan prasarana ada yang belum sesuai dengan standar layanan minimal yang ditetapkan. Untuk memenuhi standar yalayan minimal tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus berperan supaya mutu pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor dapat meningkat.

C. Pembahasan

Berikut ini pembahasan hasil penelitian implementasi Standar Pelayanan Minimum Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor yaitu:

1. Implementasi Standar Pelayanan Minimum Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di SMA Agape Tanjung Selor

Berikut ini pembahasan tentang implementasi standar pelayanan minimum sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor yaitu :

a. Ruang Kelas

Implementasi standar pelayanan minimal ruang kelas di SMA agape sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu ruang Teori/Kelas dengn ukuran panjang 9 meter dan lebar mencapai 8 Meter. Ruang kelas untuk proses pembelajaran tergolong besar karena melebihi

dari standar minimal yang ditetapkan, standar minimal yang ditetapkan kapasitas maksimum ruang kelas 28 peserta didik, sedangkan ruang kelas di SMA Agape bisa mencapai 30-40 siswa. Selanjutnya luas minimum ruang kelas 30 m^2/ lebar minimum ruang kelas 5 meter, sedangkan di SMA Agape Tanjung Selor panjang 9 meter, lebar 8 meter, dan ruang kelas memiliki fasilitas yang pencahayaan memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.

b. Ruang Perpustakaan

Implementasi standar pelayanan minimal ruang perpustakaan di SMA Agape Tanjung Selor sudah memenuhi standar minimal karena ukuran ruang perpustakaan mencapai lebar 8 meter, dan panjang 8 meter. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) menjelaskan bahwa luas ruang perpustakaan sama dengan luas satu kelas dan lebar minimum ruang perpustakaan 5 meter. Sedangkan di SMA Agape Tanjung Selor mencapai 8x8 meter, dan dilengkapi dengan buku belajar yang memadai. Selain itu, ruang perpustakaan SMA Agape Tanjung Selor dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk

membaca buku, sehingga siswa tidak merasa kesulitan membaca di dalam ruangan.

c. Ruang Laboratorium IPA

Ruang laboratorium IPA SMA Agape Tanjung Selor tidak memenuhi standar pelayanan minimal karena tidak layak digunakan dan peralatan serta perlengkapan yang dibutkan dalam kegiatan praktek tidak memadai. Salah satu program pembangunan yang dilaksanakan sekarang yaitu pembangunan gedung laboratorium IPA.

d. Ruang Pimpinan

Standar ruang pimpinan SMA Agape Tanjung Selor sudah cukup besar dan difasilitasi dengan meja dan korsi dan sopa. Ruang pimpinan memenuhi standar karena luas dari standar minimal yang ditentukan, dimana luas minimum ruang pemimpin 12 m^2 dan lebar minimum 3 meter. Ruang pimpinan sudah didesain sebaik mungkin oleh SMA Agape Tanjung Selor dengan tujuan tercapainya standar layanan minimal. Implementasi standar pelayanan minimal ruang pimpinan sudah memenuhi standar minimal, dimana ruang kepala sekolah lebih besar dari standar minimal yang ditentukan. Selain itu ruang kepala sekolah sudah dilengkapi dengan kursi, meja dan lemari. Selain itu ruang kepala sekolah mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah karena berdekatan dengan ruang guru.

e. Ruang Guru

Ruang guru SMA Agape Tanjung Selor sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditentukan, dimana luas ruangan tersebut panjang 12 meter dan lebar 8 meter. Dalam standar minimal ruang guru yaitu rasio minimum luas ruang guru 4 m^2/pendidik dan luas minimum 32 m^2 . yang artinya bahwa standar minimal ruang guru yang harus ada dan dimiliki oleh satuan pendidikan mencapai 8x8 mater. Sedangkan di SMA Agape Tanjung Selor panjang ruangan mencapai 12 meter dan lebar mencapai 8 mater.

Ruang guru SMA Agape Tanjung Selor memiliki fungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. Ruang guru difasiitasi dan dilengkai dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai, berisi bangku, meja dan sopa untuk tamu sekolah.

f. Ruang Beribadah

Ruang ibada untuk guru dan siswa sudah disediakan baik untuk yang beragama islam ataupun Kristen. Ruangan yang digunakan ruang kelas yang tidak dijadikan sebagai tempat proses pembelajaran. Ruang ibada tersebut sangat luas karena berukuran 9x8 meter. Ruang ibadah sudah memenuhi standar pelayanan minimal karena ukurannya lebih besar dari standar standar minimum 12 m^2 yang ditentukan.

g. Ruang UKS

Sekolah SMA Agape Tanjung Selor sudah memiliki UKS dan luasnyapun sudah memenuhi standar layanan minimal dengan ukuran

pangjang 4 meter, lebar 3 meter. Ruang UKS dibuat oleh SMA Agape Tanjung Selor dengan tujuan untuk memenuhi standar yang ditetapkan sehingga pada saat akreditasi, ruang UKS mendapatkan penilaian sesuai dengan standar minimal. Pada dasarnya, setiap satuan pendidikan harus memiliki ruang UKS dan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai sehingga ketika ada peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan, dengan segera dapat ditolong.

Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah di SMA Agape Tanjung Selor. Ruang UKS dipasilitasi sekolah dengan tujuan agar siswa yang mendapatkan gangguan kesehatan segera dapat ditolong. Ruang UKS di SMA Agape Tanjung Selor juga dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Raung UKS juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling sehingga pesert didik yang mengalami masalah dapatdiberikan pembinaan dan pengarahan.

h. Jamban/WC

Implementasi standar layanan minimal jamban/WC di SMA Agape Tanjung Selor belum memenuhi standar karena WC yang tersedia hanya 2 WC untuk siswa dan 1 WC untuk guru. Jamban/WC di SMA Agape Tanjung Selor masih terbatas atau masih kurang untuk guru ataupun untuk siswa. Seharusnya sekolah memfasilitasi jamban/WC untuk guru berjumlah 2 ruang untuk guru laki-laki dan guru

perempuan. Jambat/WC untuk siswa masih kurang karena jumlah siswa di SMA Agape Tanjung Selor mencapai 169. Jadi jumlah jamban/WC yang harus disediakan untuk siswa mencapai 3 WC.

Standar minimal yang harus dipenuhi oleh SMA Agape Tanjung Selor harus 3 jamban/WC jika dibandingkan dengan jumlah siswa. Dimana standar minimun 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita dan 1 unti untuk guru.

j. Gudang

Standar layanan minimal gudang di SMA Agape Tanjung Selor sudah memenuhi standar minimal karna sekolah memiliki 5 ruang gudang. Jika dihitung luasnya mencapai 12x12 meter, dimana lebih luas dari standar layanan minimal yang ditetapkan yaitu luas minimum gudang 18 m^2/4.5 meter . gudang yang luas dapat menampung peralatan dan perlengkapan yang tidak dibutukan lagi, serta dapat menyimpan arsip sekolah yang belum kategori pemusnaan.

k. Ruang Sirkulasi

Ruang sirkulasi di SMA Agape Tanjung Selor sudah memenuhi standar, dimana ruang sirkulasi tersebut menghubungkan antara ruang belajar yang ada. Dimana ruang sirkulasi tersebut berukuran 2 meter melebihi standar minimal yang ditentukan yaitu 1,8 meter. Dalam aturan standar minimal ruang sirkulasi yang horizontal berupa koridor yang menghuungkan ruangan-ruangan di dalam

bangunan sekolah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruangan pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi 2,5 meter.

l. Tempat Bermain/Olahraga

Tempat berolahraga siswa SMA Agape Tanjung Selor sudah terpenuhi akan tetapi tidak layak untuk digunakan karena kondisi lapangan tersebut berlumpur. Kondisi lapangan tidak layak digunakan oleh siswa SMA Agape Tanjung Selor disebabkan karena banjir dan air tergenang di lapangan. Tempat bermain atau berolahraga SMA Agape Tanjung Selor berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakulikuler.

Implementasi standar minimal tempat bermain atau berolahraga SMA Agape Tanjung Selor belum bisa dikatakan layak karena berlumpur dan becek. Sedangkan luas temapt berolehraga sudah memenihi standar yaitu mencapai 25x50 meter, tetapi kondisinya tidak layak digunakan.

2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi SPM Sarana Dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape

Berikut faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi SPM sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung Implementasi SPM Sarana Dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape

1. Kemapuan Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumberdaya manusia yang bekerja di SMA Agape Tanjung Selor dapat dikatakan mampu dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga sebagian besar sarana dan prasarana yang ada memenuhi standar layanan minimal. Sumber daya manuia yang bekerja di SMA Agape Tanjung Selor rata-rata berlatar belakang pendidikan Strata 1 (S1) sehingga mereka memiliki kemampuan dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan sarana dan prasaran yang ada.

2. Keberadaan Siswa

Siswa di SMA Agape Tanjung Selor masih cukup banyak,peminat sekolah tersebut masih banyak sehingga menjadifaktor pendukung dalam pengadaan sarana dan prasaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Terbukti bahwa tahun 2021 sekolah dapan bantuan dari pemerintah provinsi Kalimantan Utara untuk membangun sarana dan prasaran, mengingat bahwa siswa di sekolah tersebut harus

difasilitasi dengan sarana dan prasaran yang memadai sehingga tidak menghambat proses pembelajaran.

3. Luas Lahan Sekolah SMA Agape Tanjung Selor

Lahan yang dimiliki oleh sekolah SMA Agape Tanjung Selor cukup luas sehingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan masih sangat berpotensi. Lahan yang kosong masih tersedia. Salah satu program yang akan dilaksanakan tahun ini yaitu mambangun laboratorium IPA dan memperbaiki sarana olahraga. Luas lahan merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasikan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor. Lahan yang dimiliki oleh sekolah SMA Agape Tanjung Selor cukup luas sehingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan masih sangat berpotensi. Lahan yang kosong masih tersedia. Salah satu program yang akan dilaksanakan tahun ini yaitu mambangun laboratorium IPA dan memperbaiki sarana olahraga.

b. Faktor Penghambat Implementasi SPM Sarana Dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape

Faktor penghambat dalam implementasikan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor yaitu :

1. Dana Sekolah

Dana sekolah SMA Agape Tanjung Selor masih sangat terbatas. Selama ini, sekolah hanya mengandalkan dana Bantuan Operasi Sekolah

(BOS) untuk menggaji guru, dan membelih peralatan dan perlengkapan kegiatan pembelajaran. Sekolah belum memiliki sumber pendapatan sendiri selain dari pemerintah Provinsi Kaliamantan Utara. Dana terbatas tersebut tentu menghambat sekolah untuk mewujudkan SPM sarana dan prasarana.

2. Perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara lebih terpusat kapada sekolah-sekolah negeri, dan kurang memperhatikan sekolah-sekolah swasta, salah satunya yaitu SMA Agape Tanjung Selor. SMA Agape Tanjung Selor sudah lama beroperasi tetapi sarana dan prasaranabelum sesuai dengan standar layanan minimal yang ditetapkan. Untuk memenuhi standar minimal tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus berperan supaya mutu pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor dapat meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan di bab sebelumnya :

1. Implementasi standar pelayanan minimum sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor yang sudah terpenuhi yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang pimpinan, ruang guru, ruang beribadah, ruang UKS, gudang, dan ruang sirkulasi. Standar pelayanan minimum sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor yang belum terpenuhi ruang laboratorium IPA, jamban/WC, dan tempat bermain/olahraga.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi SPM sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape yaitu (1) Faktor pendukung: kemapuan sumber daya manusia, keberadaan siswa, dan lahan sekolah SMA Agape Tanjung Selor. (2) Faktor penghambat yaitu d terbatas dan perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sekolah swasta masih kurang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi sekolah: hendaknya sekolah atau kepala sekolah lebih giat lagi dalam mewujudkan implementasi standar sarana dan prasara pendidikan dengan

penguatan pada pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dengan pengadaan.

2. Sekolah SMA Agape Tanjung Selor melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SPM secara periodik diperlukan agar penerapan SPM dapat tepat sasaran dan selalu terus disempurnakan.
3. Bagi pemerintah: diharapkan pemerintah provinsi Kalimantan Utara dapat memperhatikan sekolah swasta akan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan formal.

LAMPIRAN